

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI SEKOLAH DASAR NEGERI
KEDANYANG KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI



Oleh :
INTAN GIRI GRESIA
NPM. 0941010034

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
SURABAYA
2014

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI SEKOLAH DASAR NEGERI
KEDANYANG KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

Disusun Oleh:

INTAN GIRI GRESIA
NPM. 0941010034

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

PEMBIMBING UTAMA

DR. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

Mengetahui
DEKAN

Dra. Ec. Hj. Suparwati, Msi
NIP. 195507181983022001

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI SEKOLAH DASAR NEGERI
KEDANYANG KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

Disusun Oleh:

INTAN GIRI GRESIA
NPM. 0941010034

Telah Dipertahankan Dihadapan Dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negarafakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal : 03 Januari 2014

Menyetujui

Pembimbing

Tim Penguji

1. Ketua

Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

2. Sekretaris

Dra. Susi Hardjati, M.AP
NIP. 196902101993032001

3. Anggota

Dra. Sri Wibawani, M.Si
NIP. 196704061994032001

Mengetahui,

Dekan

Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si
NIP. 195507181983022001

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI SEKOLAH DASAR NEGERI
KEDANYANG KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

Nama Mahasiswa : Intan Giri Gresia
NPM : 0941010034
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik

Menyatakan Bahwa Skripsi Ini Telah Direvisi Dan Disahkan
Pada Tanggal 03 Januari 2014

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

Dra. Susi Hardjati, M.AP
NIP. 196902101993032001

Dra. Sri Wibawani, M.Si
NIP. 196704061994032001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, berkat dan anugrahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI SEKOLAH DASAR NEGERI KEDANYANG KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK”.

Dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan. Selesaiannya kegiatan hingga penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya arahan dan bimbingan dari Bpk. DR. Lukman Arif, M.Si yang dengan segala perhatian, bimbingan, arahan yang bermanfaat, dan rela meluangkan waktunya untuk penulis. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan banyak terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Dra. Ec. Hj. Suparwati, MSi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. Lukman Arif, MSi, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Dra. Susi Harjati, MAP, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Takim, S. Pd, selaku Kepala Sekolah SDN Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
5. Bapak Miskan, selaku Ketua Komite Sekolah SDN Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
6. Segenap Guru dan Pegawai SDN Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi – informasi yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
7. Doa restu bapak dan ibu yang selalu memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman – temanku di Prodig Angkatan 2009 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, penulis banyak ucapkan terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu ktitik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga dengan proposal ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan khususnya bagi penulis dan bagi fakultas pada umunya serta para pembaca.

Surabaya, 17 Desember 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
LAMPIRAN	xiii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori	17
1. Pengertian peran	17
2. Peran Serta Masyarakat dalam penyelidikan.....	18
3. Pengertian Partisipasi Masyarakat	19
a. Konsep melaksanakan partisipasi masyarakat	20
b. Keberhasilan partisipasi masyarakat	21
c. Alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat	23
4. Hubungan sekolah dengan sekolah	23
5. Pengertian Komite Sekolah	24
6. Pembentukan komite Sekolah	25
a. Dasar hukum pembentukan komite sekolah	25
b. Mekanisme pembentukan komite sekolah	25

c. Tujuan pembentukan komite sekolah	26
d. Kedudukan dan sifat komite sekolah	27
7. Peran, fungsi dan tujuan komite sekolah	27
a. Peran komite sekolah	27
b. Fungsi komite sekolah	28
c. Tujuan komite sekolah	29
8. Organisasi komite sekolah	29
C. Kerangka Berpikir	39
 BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis penelitian	40
B. Lokasi penelitian	42
C. Fokus Penelitian	42
D. Sumber data dan jenis data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46
G. Keabsahan Data	49
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Sekolah Dasar Negeri Kedanyang	52
1. Letak dan wilayah administratif	52
2. Visi, misi dan tujuan sekolah dasar Negeri Kedanyang	53
B. Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri Kedanyang	55
C. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Sekolah	57
D. Komposisi Pegawai Sekolah Dasar Negeri Kedanyang	70
E. Struktur Organisasi Komite Sekolah Dasar Negeri Kedanyang	74
F. Peran dan Fungsi Komite Sekolah	76
1. Peran Komite Sekolah	76
2. Fungsi Komite Sekolah	76
G. Komposisi Komite Sekolah Dasar Negeri Kedanyang	78
H. Hasil Penelitian	79

1. Peran komite sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency)	80
a. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam program sekolah.....	81
b. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam Penyusunan RAPBS.....	83
c. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam pengadaan sumber daya manusia pendidikan	88
2. Peran komite sekolah sebagai badan pendukung (supporting agency)	87
a. Peran komite sekolah sebagai pendukung dalam pengelolaan sumber daya	87
b. Peran komite sekolah sebagai pendukung dalam pengelolaan sarana dan prasarana	89
c. Peran komite sekolah sebagai pendukung dalam pengelolaan anggaran	91
3. Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (Controlling Agency)	93
a. Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol dalam mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah	93
b. Peran komite sekolah perencanaan dalam kontrol terhadap pelaksanaan program sekolah	95
c. Peran komite sekolah perencanaan dalam kontrol terhadap output pendidikan	96
4. Peran komite sekolah sebagai mediator	98
a. Peran komite sekolah sebagai mediator dalam perencanaan	98
b. Peran komite sekolah sebagai Mediator dalam pelaksanaan program	101
I. Pembahasan	103

1. Peran komite sekolah dalam bentuk pemberi pertimbangan (Advisory Agency).....	104
2. Peran komite sekolah dalam bentuk pendukung (supporting agency)	106
3. Peran komite sekolah dalam bentuk pengontrol (controlling agency)	109
4. Peran komite sekolah dalam bentuk mediator (mediating agency)	110
 BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
 DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Komposisi pegawai sekolah dasar negeri Kedayang Kec.	
Kebomas Kab. Gresik berdasarkan jenis kelamin	70
Tabel 4.2. Komposisi pegawai sekolah dasar negeri Kedayang Kec.	
Kebomas Kab. Gresik berdasarkan tingkat pendidikan	71
Tabel 4.3. Komposisi pegawai sekolah dasar negeri Kedayang Kec.	
Kebomas Kab. Gresik berdasarkan pangkat / golongan	71
Tabel 4.4. Komposisi pegawai sekolah dasar negeri Kedayang Kec.	
Kebomas Kab. Gresik berdasarkan usia	72
Tabel 4.5. Jumlah datar siswa SDN Kedayang	73
Tabel 4.6. Fasilitas di SDN Kedayang Kec. Kebomas Kab. Gresik	74
Tabel 4.7. Komposisi komite sekolah Dasar Negeri Kedayang Kec.	
Kebomas Kec. Gresik berdasarkan Garis Kelamin	78
Tabel 4.8. Komposisi komite sekolah Dasar Negeri Kedayang Kec.	
Kebomas Kec. Gresik berdasarkan Tingkat Pendidikan	78
Tabel 4.9. Komposisi komite sekolah Dasar Negeri Kedayang Kec.	
Kebomas Kec. Gresik berdasarkan usia	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kondisi sarana dan prasarana sekolah	8
Gambar 2.1 Kerangka berpikir	39
Gambar 3.1 Analis Model Interaktif Menurut Miles & Hiberan	48
Gambar 4.1 Struktur organisasi Sekolah dasar Negeri Kedanyang	56
Gambar 4.2 Struktur Komite Sekolah Dasar Negeri Kedanyang	75

LAMPIRAN

Data Guru dan Penjaga Sekolah SDN Kedanyang
Surat Keterangan Selesai Penelitian

ABSTRAKSI

Intan Giri Gresia, 0941010034, Peran Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Di Sekolah Dasar Negeri Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

Penelitian ini didasarkan oleh pada masalah terhadap minimnya sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan akademik dan non akademik. Oleh karena itu bagaimana peran komite sekolah dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di SDN Kedayang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini seperti pengamatan, wawancara Mendalam, serta Dokumen. analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif ini dapat memperoleh keteraturan dan sistematis yang ketiganya saling berkaitan yaitu meliputi: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa (a) Peran Komite Sekolah Dalam Bentuk Pemberi Pertimbangan (Advisory Agency) meliputi program sekolah, penyusunan RAPBS, dan pengadaan SDM pendidikan, komite sekolah sudah dijalankan dengan baik. (b) Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency), perannya sebagai badan pendukung dapat dilihat dari komite sekolah sebagai pendukung dalam pengelolaan sumber daya, pengelolaan sarana dan prasarana serta dalam pengelolaan anggaran. Peran komite sekolah sebagai pemberi pendukung dalam penyusunan RAPBS, dalam pengelolaan sumber daya membantu dalam pengadaan tenaga kerja pendidik dalam akademik maupun non akademik. Tetapi komite sekolah dalam pendukung pengelolaan sarana dan prasarana memberikan dukungan melalui sumbangan buku di perpustakaan. (c) Peran Komite Sekolah Dalam Bentuk Pengontrol (Controlling Agency) dapat dilihat dari komite sekolah sebagai pengontrol dalam perencanaan pendidikan, pelaksanaan program sekolah dan output pendidikan. Komite sekolah melakukan pengawasan 2 bulan sekali. Pada saat rapat komite sekolah diundangkan untuk mengawasi dan diberi tahu dari hasil rapat tersebut. (d) Peran Komite Sekolah Dalam Bentuk Mediator (Mediating Agency) dapat dilihat dari peran komite sekolah sebagai mediator, komite sekolah memberikan usulan kepada kepala sekolah yang sudah diterima dari keluhan wali murid serta melaksanakan dengan cara mediasi dengan kepala sekolah SDN Kedayang. Peran komite sekolah sebagai mediasi belum bisa melaksanakan mediasi dengan kepala sekolah karena tidak ada keluhan yang harus dimediasikan kepada kepala sekolah. Secara umum peran komite sekolah sudah berjalan dengan baik tetapi dalam mendukung sarana dan prasarana pendidikan nasional yang belum dimiliki sesuai standar pendidikan nasional belum bisa dilakukan karena dana di miliki sekolah hanya cukup untuk mendukung kegiatan operasional masih memberi sumbangan buku.

Kata kunci : komite sekolah, penyelenggaraan pendidikan

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka Pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang bersifat universal. Di Indonesia pendidikan merupakan kebutuhan seluruh warga Negara. Oleh karena itu, pengembangannya harus konseptual, menyeluruh, fleksibel dan berkesinambungan. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraannya, maka salah satu upaya yang ditempuh adalah kebijakan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang akhir - akhir ini menjadi agenda terhangat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Konsep baru ini cenderung disambut dan diapresiasi sebagai sebuah angin segar dalam proses perjalanan penyelenggaraan lembaga pendidikan dengan lebih mengintensifkan keterlibatan masyarakat.

Sekolah merupakan salah satu tempat pelaksanaan proses pembentukan karakter bangsa. Namun pembentukan karakter bangsa ini bukan hanya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah saja, tetapi semua komponen yakni orang tua, masyarakat, dan pemerintah harus bersatu padu membina keberadaan lembaga pendidikan tersebut. Masyarakat terhadap pendidikan harui di ikutkan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat yang tercakup dalam kelompok orang tua dan kelompok masyarakat lainnya di luar sekolah atau di lembaga pendidikan itu sendiri perlu digalakkan agar sekolah menjadi pusat pembinaan karakter bangsa.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah,

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercaainya demkratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yng lebih optimal.
- b. dukugan peran serta masyarakatperlu di dorong unuk bersinergi suatu wadah dewan pendidikan dan komite ekolah mandiri.

Di dalam Keputusan Menteri Pendidik-an Nasional Nomor 044 /U/2002, dijelaskan Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dan dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Komite Sekolah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 /U/2002 dengan harapan agar masyarakat ikut serta mengambil bagian di dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, akan tetapi juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 /U/2002, Komite Sekolah diharapkan dapat melaksanakan peran - peran sebagai:

1. pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan,
2. pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
3. pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, dan

4. mediator antara pemerintah (mediating agency) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Adapun fungsi Komite Sekolah adalah sebagai berikut:

1. membantu sekolah mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas),
2. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu,
3. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan / organisasi / dunia usaha / dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu,
4. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat,
5. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. kebijakan dan program pendidikan,
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS),
 - c. kriteria kinerja satuan pendidikan,
 - d. kriteria tenaga kependidikan,
 - e. kriteria fasilitas pendidikan, dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
6. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan,

7. menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, dan
8. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi banyak faktor yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Di antara faktor tersebut adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Mulai bantuan pemikiran, sarana dan prasarana, pembiayaan serta aspek lain. Sesuai dalam Kepmendiknas nomor 44 tahun 2002 tentang Komite Sekolah sebagai lembaga resmi yang menjadi mitra sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sarana dan Prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal. Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian prasarana dan sarana pendidikan, sekolah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam mengatur dan mengurus kebutuhan sekolah menurut kebutuhan berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang undangan pendidikan nasional yang berlaku.

Dalam mewujudkan dan mengatur hal tersebut pemerintah melalui PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan, diperbarui menjadi PP No. 32 Tahun 2013 Bab VII Pasal 42 ayat (1) dengan

tegas disebutkan bahwa; Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ayat (2): Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standart sarana dan prasarana sekolah dasar/ madrasah diatur tersendiri berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional republic Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang standart sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah tsanawiyah (smp/mts), dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA). Pada poin D ketentuan prasarana dan sarana, sebuah SD/MI sekurang – kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut : Ruang kelas, Ruang perpustakaan, Laboratorium IPA, Ruang pimpinan, Ruang guru, Tempat ibadah, Ruang UKS, Jamban, Gudang, Ruang sirkulasi dan Tempat bermain/berolahraga.

Tabel 1.1 keterangan prasarana di sekolah dasar negeri kedanyang
kecamatan kebomas kabupaten gresik

No	Uraian	Jumlah Ruang	Keadaan	Keterangan
1	Ruang Kelas	14	Cukup Baik	
2	Ruang kepala Sekolah	1	Baik	
3	Ruang Guru	1	Baik	
4	Ruang Perpustakaan	1	Baik	
5	Ruang Tata Usaha	1	Baik	
6	Ruang UKS	1	Cukup Baik	
7	Ruang Komputer	1	Baik	
8	Ruang Media	1	Baik	
9	Musholla	1	Baik	

Sumber : Sekolah Dasar Negeri Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik (2013)

Dari table tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa sarana dan prasarana yang seharusnya dimiliki oleh sekolah dasar negeri kedanyang kecamatan kebomas kabupaten gresik berdasarkan PP No. 32 Tahun 2013 Bab VII Pasal 42 ayat (2) dan peraturan menteri pendidikan nasional republic Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang standart sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah tsanawiyah (smp/mts), dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) Pada poin (D) ketentuan prasarana dan sarana masih belum sesuai karena masih belum memiliki prasarana yaitu laboratorium IPA.

Ketentuan di atas mengatakan bahwa Sarana dan Prasarana pendidikan merupakan menjadi salah satu tolok ukur dari mutu sekolah. Tetapi fakta dilapangan banyak ditemukan sarana dan prasarana yang tidak dikelola dengan baik. Untuk itu diperlukan pemahaman dan

pengaplikasian pentingnya sarana dan prasarana pendidikan persekolahan berbasis sekolah. Bagi Komite sekolah sebagai lembaga resmi yang menjadi mitra sekolah pemahaman tentang sarana dan prasarana akan membantu memperluas wawasan tentang bagaimana dapat berperan sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), pendukung (supporting agency), pengontrol (controlling agency), dan mediator antara pemerintah (mediating agency) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Sehingga bisa mengelola sarana dan prasarana dengan baik dan memperbaiki sesuai standart ketentuan peraturan menteri pendidikan no 24 tahun 2007 guna mencapai tujuan pendidikan.

Selain beberapa sarana prasarana yang tidak dimiliki, berdasarkan observasi awal peneliti pada tanggal 22 juli 2013 menemukan fakta di SDN Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Kondisi prasarana tempat bermain/berolahraga di SDN Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik juga hampir setengah dari lapangannya (tempat bermain/berolahraga) digunakan untuk tempat parkir sepeda peserta didik. Sarana dan Prasarana tempat bermain / berolahraga dalam Permendiknas 24 Tahun 2007 berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara dan kegiatan ekstrakurikuler, tidak digunakan untuk tempat parkir. Dan merupakan ruang bebas yang memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda – benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga. Seperti tampak pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1 Kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah



Dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan nasional sesuai pasal 56 uu republic indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 56 menyatakan bahwa

- a. masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- b. Dewan pendidikan sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- c. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lanjut dengan peraturan pemerintah. Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional Republik Indonesia Nomor 44/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal.

Di sekolah dasar negeri kedanyang sudah terbentuk komite sekolah. Tujuan dibentuk komite sekolah adalah memwadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, dan menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 /U/2002, Komite Sekolah diharapkan dapat melaksanakan peran - peran sebagai:

5. pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan,
6. pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
7. pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, dan

8. mediator antara pemerintah (mediating agency) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Berdasarkan dari kondisi objektif dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian : Peran Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Di Sekolah Dasar Negeri Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan setidaknya penulis mengerti yang akan diteliti atau yang akan diselidiki, karena berangkat dari masalah inilah dapat disusun konsep tentang penelitian yang sangat dibutuhkan dalam proses penelitian itu sendiri, adapun perumusan masalah tersebut adalah berikut :

“Bagaimanakah peran Komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan nyata sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang berharga bagi penulis sekaligus mengembangkan teori dalam disiplin administrasi publik terhadap obyek penelitian.

b. Bagi instansi

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan instansi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

c. Bagi universitas

Untuk menambah referensi dan literatur perbendaharaan pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang sejenis khususnya pada fakultas ilmu administrasi di universitas pembangunan nasional “veteran” jawa timur.